



Jurnal Akuntansi & Ekonomika

Available at <http://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae>

PENGARUH TINDAKAN KORUPSI TERHADAP KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Agustiawan^{1*)}, Della Hilia Anriva²

¹²Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jalan Tuanku Tambusai Ujung

*) email: agustiawan@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: Oktober 2019

Accepted: Oktober 2019

Published: Desember 2019

Keywords:

Tindakan Korupsi, Kinerja, SEM-PLS

JELClassification:

<https://www.aeaweb.org/ecolnit/jelCodes.php?view=jel#G>
<https://www.aeaweb.org/ecolnit/jelCodes.php?view=jel#M>

Abstract

Penelitian in membahas tindakan korupsi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Tujuan dilakukan penelitian in untuk menguji tindakan korupsi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Penelitian in dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Pekanbaru. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis kuantitatif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS)* menggunakan *software WarpPLS 3.0*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan korupsi berpengaruh dengan kinerja organisasi sector publik. Hal ini mengindikasi bahwa korupsi yang terjadi diorganisasi sector publik memilik pengaruh terhadap kinerja organisai sektor publik.

PENDAHULUAN

Tingginyatingkatkorupsidiindonesiamengakibatkanrendahnyakepercayaanmasyarakat terhadap pemerintahan. KPK dari tahun ketahun melakukan penanganan tindak pidana koruspi dari tahun 2004-2017 sebagai berikut: penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, inkracht 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara (acch.kpk.go.id). Fenomena di atas berbanding terbalik dengan realita yang ada. Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (LPPD) menunjukanhasilayangpositif.

Berdasarkanpeningkatanpidanakorupsidaritahunketahunselalu mengalami kenaikan, hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakinmenurun.Di Indonesia korupsi memiliki kekuatan destruktif yang signifikan. Tidak hanya membahayakankekayaanegara,tetapijugamenghilangkanlegitimasipenegakanhukumdenganmenghancurkan kepercayaan publik terhadap hukum (Isra, Yuliandri, Amsari, & Tegnan, 2017). Ketidak berhasilan implementasi akuntabilitas adalah karena akuntabilitas dipandang sebagai kewajiban untuk menjalankan dan menjustifikasi perilaku aktor akuntabilitas (Manafe & Akbar, 2015).

Teori *Fraud Triangle*

Teori fraud triangle atau teori segitiga kecurangan muncul dari seorang ahli kriminalogi Amerika Donald Cressey. Donald Cressey mengungkapkan hipotesis:

“Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property”.

Dapat disimpulkan bahwa Orang yang tepercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika

merekamenganggapdirimerekamemilikimasalahkeuanganyangtidakdapatdibagikan,mereka mennganggap bahwa masalah keuangan yang mereka hadapi dapat diselesaikan secara diam-diam dengan melanggarkan kepercayaan yang diberikan. Para pelaku kecurangan melakukan tindakan kecurangan ketika masalah pribadi yang dihadapi tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Kesulitan keuagan, kehilangan jabatan, pengakuan kesalahan yang buruk memiliki potensi masalah yang sulit untuk diungkapkan dengan orang lain. faktor-faktor tersebut membuat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Secara umum teori ini menyimpulkan bahwa ada tiga sifat pelaku kecurangan dalam melakukan kecurang, yakni: tekanan, peluang, dan rasionalisai. Tekanandapatmembuatoorangmelakukankecurangan, peluangmemberikansarana untuk melakukan penipuan/kecurangan dan rasionalisasi membantu pelaku untuk mencari kebenaran terkait tindakan yang dilakukan(Dellaportas, 2013).

Korupsi

Tanzimendefinisikankorupsisebagaipenyalahgunaankekuasaanpublikdemikeuntungan pribadi. Keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme (Near, 1985). Seseorang dapatdikatakan melalukan tindakan korupsi apabila secara tidak sah meletakkan

kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan amanah yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Penipuan sebagai tindakan yang disengaja atau kesalahan yang dibuat oleh orang atau kelompok orang-orang yang telah berubah-ubah kesalahan dapat menghasilkan kerugian bagi individu dan organisasi [16]. Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah hal atau perilaku yang dapat merugikan orang lain dengan menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah benar.

Kinerja

(Coste & Tudor, 2013) mendefinisikan kinerja sebagai kuantitas dan kualitas suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi/instansi. Kinerja memiliki arti yang kompleks dan dapat diperdebatkan karena memiliki arti yang kompleks tergantung pada kondisi.

Kerangka Konseptual

Model Kerangka Konseptual



Gambar 1. Model Penelitian

Hubungan Korupsi dan Kinerja Organisasi Sektor Publik

Korupsi adalah masalah persisten yang melanda dunia, ia tidak mengenal batas (Mandy M. Cheng, Axel K-D. Schulz, Peter F. Lockett, 2003). Korupsi merupakan masalah yang dihadapi negara-negara pasca-komunis ketika mereka bertransisi ke demokrasi dan ekonomi pasar, serta demokrasi yang telah mapan dan rezim lain. Kinerja selalu terkait dengan pemerintahan yang baik yang menyiratkan organisasi publik mengelola dan publik dan menjamin penyalahgunaan dan korupsi.

H1: Diduga tindakan korupsi berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Riau khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekanbaru Kota. Sampel penelitian ini adalah eksekutif senior pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota di Pekanbaru. Data Jumlah sampel diperoleh dan diakses melalui situs resmi pada masing-masing Badan, Dinas, Kecamatan se Kota Pekanbaru. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner. Variabel dalam penelitian ini adalah Korupsi dan Kinerja. Penelitian ini menggunakan instrumen yang siap pakai berupa kuesioner yang telah diketahui validitas dan

reliabilitasnya karena instrument-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut diadopsi dari literature yang ada dan telah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Analisis kuantitatif atau pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS)* menggunakan *software WarpPLS 3.0*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian survei dalam bentuk pengiriman kuisioner kepada responden. Sebanyak 142 responden yang diteliti. Responden yang di survei terdiri dari pejabat eselon dua sebanyak 2 orang, eselon tiga sebanyak 20, eselon empat 39 orang dan sisanya 20 orang tidak menjawab pertanyaan terkait jabatan. Responden yang di survei terdiri dari laki-laki sebanyak 43, perempuan 38 dan sisanya sebanyak 1 tidak diketahui karena tidak menjawab pertanyaan terkait jenis gender. Rata-rata responden yang diteliti sudah berpengalaman dibidangnya terlihat dari pengalaman kerja mereka yang sudah lebih dari 15 tahun yaitu sebanyak 34.15%. Gambaran detail responden bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Karakteristik Demografi Responden (N=82)

Karakteristik Responden		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	• Laki-laki	43	52.4%
	• Perempuan	38	46.3%
	• Tidak Menjawab	1	2.3%
Jabatan	• Eselon II	3	3.66%
	• Eselon III	20	24.39%
	• Eselon IV	39	47.56%
	• Tidak Menjawab	20	24.39%
Kelompok Umur	• <30	3	3.66%
	• 30-40	19	23.17%
	• 41-50	34	41.46%
	• >50	20	24.39%
	• Tidak menjawab	6	7.32%
Tingkat Pendidikan	• SMA	1	1.22%
	• Diploma	3	3.66%
	• Sarjana	40	48.78%
	• Master	20	24.39%
	• Doktor	-	-
	• Tidak Menjawab	18	21.95%

Latar Belakang Pendidikan	• Akuntansi	10	12.20%
	• Lainnya	40	48.78%
	• Tidak Menjawab	32	39.02%
Pengalaman Kerja	• <2 tahun	-	-
	• 2-5 tahun	8	9.76%
	• 6-10 tahun	13	15.85%
	• 11-15 tahun	22	26.83%
	• >15 tahun	28	34.15%
	• Tidak Menjawab	11	13.41%
Pengalaman Kerja di Posisi Sekarang	• <2 tahun	15	18.29%
	• 2-5 tahun	18	21.95%
	• 6-10 tahun	10	12.20%
	• 11-15 tahun	6	7.32%
	• >15 tahun	4	4.88%
	• Tidak Menjawab	29	35.37%

Hasil Uji Realibilitas

Penelitian ini menggunakan analisis persamaan struktural dalam melakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Namun persamaan structural dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu uji validitas dan reliabilitas (Sholihin dan Ratmono, 2013). Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan berdasarkan uji validitas konvergen dan validitas diskriminan telah memenuhi standar minimal dengan nilai faktor *loading* di atas 0.50 dan *p-value* di bawah 0.05. Sehingga seluruh konstruk dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan analisis. Hasil pengujian reliabilitas juga menunjukkan semua konstruk telah memenuhi reliabilitas konsistensi internal yang dilihat dari nilai reliabilitas komposit dan *cronbach's alpha* di atas 0,70. (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Konsistensi Internal

Konstruk	Reliabilitas Komposit	<i>Cronbach's alpha</i>
Korupsi	0.961	0.956
Kinerja	0.896	0.862

Sumber: Output Warp-PLS, 2019 (data diolah)

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan model persamaan struktural dalam penelitian ini ditentukan dengan melihat nilai koefisien jalur, *standard errors*, *P-values*, dan *effect sizes* dari hasil analisis yang dilakukan. Rincian hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis SEM-PLS dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 3



Gambar 2.Hasil Pengujian SEM-PLS

Tabel 3. Koefisien Jalur, *P-Values*, *Standard errors*, dan *Effect sizes*

Variabel	Koefisien Jalur	<i>P-Values</i>	<i>Standard</i>		Hasil penelitian
			<i>errors</i>	<i>Effect sizes</i>	
Tindakan Korupsi → Kinerja	0.636	<0.001	0.067	0.404	Terdukung

** Signifikan pada level 0.01 (*2-tailed*)

*** Signifikan pada level 0.001 (*2-tailed*)

Sumber: Output Warp-PLS (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis tentang pengaruh variabel tindakan korupsi terhadap kinerja organisasi sektor publik terbukti signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.636, *p-value* < 0.001, dan *effect size* yang tergolong kuat yaitu sebesar 0.404. Hal ini berarti bahwa tindakan korupsi memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik, yang mengindikasikan bahwa korupsi yang terjadi di daerah berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan organisasi. Temuan penelitian ini menghasilkan pengaruh yang positif antara tindakankorupsi dengan kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada table 3. Hal ini berarti bahwa banyaknya kasus korupsi yang terjadi tidak membuat kinerja pemerintah menurun. Hasil Penelitian ini didukung oleh (Ahyaruddin, dan Amrillah, 2018) yang mengatakan bahwa kasus korupsi tidak membuat citra pemerintah dalam hal ini kinerja pemerintah menurun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kinerja yang baik tersebut diikuti oleh korupsi yang semakin meningkat di daerah. Hal ini menjadi temuan yang sangat menarik bahwa kinerja pemerintah yang baik dapat dilihat dan tercermin di laporan BPK yang mendapat nilai WTP juda diikuti dengan korupsi yang semakin meningkat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa tindakan korupsi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Temuan ini menjadi menarik bahwa tindakan korupsi berefek positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini memberikan simpulan bahwa opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah akan berdampak terhadap meningkatkan kinerja pemerintah daerah kota pekanbaru. Namun, kinerja yang baik tidak menjamin suatu daerah atau pemerintah terbebas atau terhindar dari tindakan korupsi atau penyelewengan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan hanya pada organisasi sektor publik di kota pekanbaru dengan membatasi ruang lingkup pada SKPD. Sehingga hasil penelitian ini mungkin hanya bisa digeneralisasikan pada area tersebut.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor terkait tindakan korupsi seperti menggunkan faktor-faktor teori segitiga kecurangan dan memperluas wilayah penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan memperbesar area populasi dan memperluas ruang lingkup organisasi sektor publik, tidak hanya SKPD, tetapi juga organisasi sektor publik lain yang memberikan pelayanan kepada public/

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., Riau, U. M., Amrillah, M. F., & Riau, U. I. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(December), 417–468. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9028>
- Coste, A.-I., & Tudor, A. T. (2013). Service Performance - Between Measurement and Information in the Public Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 92(Lumen), 215–219. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.662>
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting Forum*, 37(1), 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003>
- Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>
- Manafe, M. W. N., & Akbar, R. (2015). Accountability and performance measures. *Academy Magazine*, 4(1), 16-17,19. Retrieved from <http://ezproxy.auckland.ac.nz/login?url=http://search.proquest.com/docview/1651366044?accountid=8424> http://openurl.auckland.ac.nz/resolve?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aeducation&atitle=Accounta

- Mandy M. Cheng, Axel K-D. Schulz, Peter F. Lockett, and P. B. (2003). The Effects of Hurdle Rates on the Level of Escalation of Commitment in Capital Budgeting. *Behavioral Research in Accounting: February 2003, Vol. 15, No. 1, Pp. 63-85., 15(1), 63–68.*
- Near, J. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. *Journal of Business Ethics Feb ABI/INFORM Global Pg, 4(1), 1986–1.* <https://doi.org/10.1007/BF00382668>
- Sholihin Mahfud, Dwi Ratmono. 2013. *Analisi SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis.* Andy Offset Yogyakarta